

Rekomendasi Kebijakan

Mendorong Terobosan Program Moderasi Beragama di Tingkat Lokal

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia
Hak Cipta 2023, pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Pengaruh Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Mendorong Terobosan Program Moderasi Beragama di Tingkat Lokal

© Haris Burhani, dkk 2023
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Cetakan I, Desember 2023

Penulis
Haris Burhani, Alamsyah M Dja'far, Fahmi Syahirul Alim

Penyelia
Aksara Miftah Fadhlullah

Rancang Sampul & Tata Letak Isi
Miftah Fadhlullah

ISBN:

Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
2023

Daftar Isi

Pengantar.....	4
Isu-isu Strategis.....	4
Rekomendasi.....	5

Mendorong Terobosan Program Moderasi Beragama di Tingkat Lokal

Pengantar

Sebagai sebuah kebijakan dan agenda nasional, Moderasi Beragama ditetapkan pada 2019 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda Nasional ini ditindaklanjuti dengan menjadikan dan mengarusutamakan Moderasi Beragama menjadi Program Strategis Kementerian Agama dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Namun, sebagai sebuah tradisi dan nilai, moderasi beragama telah tumbuh dan dipraktikkan berabad-abad lampau. Nilai Moderasi Beragama hakikatnya juga sejalan dengan nilai-nilai universal yang dimiliki agama dan keyakinan di Indonesia.

Rekomendasi kebijakan ini disusun untuk merumuskan sejumlah isu strategis bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan nilai-nilai moderasi dan bagaimana Kementerian Agama memperkuatnya lewat program dan kebijakan-kebijakan terutama di tingkat lokal. Dokumen ini didasarkan dari hasil kajian lapangan pada 2022 yang difasilitasi Pusitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Riset dilakukan di sepuluh daerah: Purwakarta, Minahasa Utara, Magelang, Makassar, Mataram, Jember, Bangka Belitung, Lebak, Bukittinggi, Aceh Tengah. Hasil riset diterbitkan pada 2023 dengan judul *Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia*.

Isu-isu Strategis

Berdasarkan riset di sepuluh daerah, terdapat sejumlah isu strategis berikut:

1. Di sejumlah daerah, struktur Kementerian Agama di daerah seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama, atau Kantor Urusan Agama) memperlihatkan berbagai upaya menjalankan kebijakan Moderasi Beragama. Upaya itu dilakukan melalui program dan peran rutin atau upaya-upaya baru berdasarkan tantangan dan situasi di lapangan. Ini terlihat pada kisah dari Jombang, Aceh Tengah, Bukit Tinggi, dan Minahasa Utara. Penguatan Moderasi Beragama dilakukan melalui penyuluhan, pengajian, *workshop*, seminar, bimtek, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Lewat cara ini, istilah moderasi dikenal publik.
2. Hampir semua riset memperlihatkan, nilai Moderasi Beragama bukan hal asing. Ia tumbuh dan berakar kuat dalam nilai, tradisi, dan kebudayaan di daerah-daerah yang menjadi area riset ini. Di Minahasa Utara dikenal istilah *torang samua basudara* (kita semua bersaudara) dan *sitou timou tumou tou* (rasa saling terbuka dan menerima perbedaan). Di Pulau Bangka terdapat tradisi *nganggung*, tradisi

membawa makanan dari rumah untuk disantap pada sebuah acara besar. Di Jawa ada tradisi *sambatan*, tradisi gotong royong untuk membangun rumah.

3. Sebagai sebuah kebijakan nasional, Moderasi Beragama masih dipahami masyarakat secara berbeda dengan yang tertuang dan dikehendaki dalam kebijakan tertulis. Seperti pada kisah dari Aceh Tengah. Sebagian masyarakat menilai moderasi beragama tidak berbeda dengan program P4 yang populer di masa Orde Baru dan dilihat sebagai program indoktrinasi. Istilah Moderasi Beragama dinilai justru membuat masyarakat mudah menilai seseorang atau sekelompok orang moderat dan tidak moderat. Penolakan terhadap istilah itu juga datang dari tokoh agama, seperti kisah dari Bukit Tinggi dan Jombang.
4. Program Moderasi Beragama masih berfokus pada perubahan cara pandang dan masih memerlukan kerja keras untuk mengoperasionalisasinya ke dalam kebijakan yang efektif mencegah atau menangani konflik-konflik keagamaan dengan akar dan konteks yang beragam. Tantangan ini misalnya terlihat dari kisah di Bukit Tinggi dan Purwakarta.

Rekomendasi

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, berikut ini lima rekomendasi yang perlu Kementerian Agama lakukan:

1. Memperkuat program-program strategis untuk penanganan konflik keagamaan dengan melibatkan penyuluh terlatih, FKUB, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.
2. Mengembangkan narasi alternatif tentang Moderasi Beragama berbasis nilai-nilai lokal yang sudah digali dan ditemukan dalam riset-riset Kementerian Agama.
3. Merumuskan dan menjalankan program-program baru dan inovatif untuk memperkuat Moderasi Beragama seperti namun tidak terbatas program seni, budaya, dan teknologi digital.
4. Mengembangkan konter narasi melalui media luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan tujuan mengurangi kekeliruan publik tentang Moderasi Beragama.
5. Mengembangkan kajian dengan melibatkan para pemangku kepentingan strategis (pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, media) untuk melahirkan rekomendasi kebijakan untuk melahirkan program-program inovatif dan strategis dalam penguatan Moderasi Beragama.